

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Beberapa Anggota DPRD provinsi Sumbar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat baik aspirasi yang bersifat pembangunan Fisik dan Non Fisik maupun aspirasi yang bersifat pribadi. Kemampuan komunikasi yang mumpuni adalah awal dari realisasi aspirasi masyarakat. Pengalaman komunikasi yang dialami oleh anggota DPRD Sumatera Barat juga tidak mudah, lobi-lobi politik kepada pihak-pihak yang terkait seperti DPRD Kab/Kota, Bupati dan Walikota, dan DPR RI mesti dilakukan demi meminimalisir terjadinya hambatan. Aspirasi yang mengarah kepada aturan dan kebijakan maka akan diarahkan lagi ke pembuatan regulasi dan kebijakan. Terkait dengan aspirasi yang bersifat keperluan pribadi tetap akan dipenuhi dengan cara lain.

Namun ada beberapa anggota DPRD Sumatera Barat yang hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku, terkait dengan aspirasi yang tidak dapat di penuhi subjek akan berkomunikasi kembali kepada masyarakat dengan memberikan arahan, pemahaman kepada masyarakat.

Sementara itu keadaan dimana terjadinya tidak proaktifnya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya masa reses sebagai bagian

proses komunikasi politik dalam pembangunan Sumatera Barat adalah bentuk hambatan terbesar yang dialami oleh anggota DPRD Sumatera Barat.

2. Makna esensial pengalaman komunikasi terdapat 3 (tiga) pandangan yang mengemuka dari subjek-subjek terhadap tanggung jawab politiknya dalam menyerap aspirasi adalah; (1) Penyerapan aspirasi yang dilakukan dalam bentuk *reses* adalah kesempatan yang senantiasa ditunggu-tunggu dengan antusias oleh anggota dewan untuk bertemu dengan masyarakat. (2) Penyerapan aspirasi (*reses*) adalah suatu upaya melibatkan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan. (3) *Reses* adalah suatu aturan yang tersistem dan tercantum di Undang-undang sebagai kewajiban anggota dewan. Sementara itu dua perbedaan yang mencolok terkait dengan pandangan terhadap agenda komunikasi politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah; (1) Aspirasi masyarakat haruslah diperjuangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (2) Tidak semua aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan karena berkaitan dengan kewenangan masing-masing tingkatan dewan. Makna esensial lain juga ditemukan dalam empat bentuk, yakni: (1) pengalaman komunikasi politik subjek berkaitan langsung dengan relasi kuasa, (2) Kepuasan dan strategi politik, (3) Tanggung jawab dan keberhasilan politik, (4) komunikasi politik sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat.